

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) atau Balai Penyuluhan Kecamatan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan, berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerjanya. Perubahan pola pikir dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha, persaingan pasar regional dan pasar global, fenomena perubahan iklim, kebutuhan akan kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh dan mandiri serta tuntutan penyuluh yang profesional berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan prima dalam penyediaan jasa penyuluhan dan penyediaan informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha.

Hariadi (2015), menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pertanian BPP sebagai *center of extension* (pusat perpanjangan) yang memegang peranan penting karena menjadi pusat kegiatan, baik penyuluh pertanian, swadaya maupun swasta. Fungsi dan peran BPP dikembangkan untuk mencapai harapan yang diinginkan, yaitu swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Peran dan fungsi balai penyuluhan pertanian antara lain penyusunan program penyuluhan, menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi, memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh dan petani, melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan usaha untuk mendukung program swasembada pangan serta sebagai tempat pertemuan para penyuluh dan pelaku utama dan usaha.

Salah satu kebijakan penyuluhan adalah memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan, termasuk didalamnya Balai Penyuluhan Pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa.

Hasil penilaian berdasarkan indikator kemampuan BPK/BP3K di berbagai BPK/BP3K akan menghasilkan nilai yang beragam mulai dari nilai rendah sampai

nilai tertinggi, yang merupakan gambaran dari kinerja BPK/BP3K. Hasil penilaian terhadap kemampuan BPK/BP3K menjadi dasar penetapan kelas kemampuan BPK/BP3K, dan menjadi bahan masukan dalam pembinaan serta merumuskan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan atau menaikkan kelas BPK/BP3K sesuai dengan kelasnya. Klasifikasi BPK/BP3K dibagi ke dalam 4 (empat) kelas yakni: kelas pratama (nilai ≤ 475), kelas madya (nilai 476-650), kelas utama (nilai 651-825), dan kelas aditama (nilai 826-1.000) (Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan, 2014).

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat (2018), Kabupaten Langkat mempunyai 23 BPP yang terdiri dari Bahorok, Sirapit, Kutambaru, Salapian, Kuala, Selesai, Sei Bingai, Binjai, Stabat, Hinai, Secanggih, Wampu, Babalan, Tanjung Pura, Padang Tualang, Sawit Seberang, Batang Serangan, Sei Lapan, Gebang, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang, dan Pematang Jaya.

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan tugas sebagai lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan, BPP perlu diperkuat dan diberdayakan. Dari semua BPP yang ada di Kabupaten Langkat hanya beberapa saja yang akan dijadikan sebagai sampel antara lain adalah BPP Hinai, Gebang dan Tanjung Pura dilihat dari jumlah penyuluh, keaktifan penyuluh dalam mengikuti kegiatan pelatihan, sarana dan prasarana yang tersedia, infrastruktur, dan pimpinan BPP.

Berdasarkan fokus latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang **“Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat”**.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah

1. Rendahnya beberapa kelas BPP yang ada di Kabupaten Langkat
2. Belum diketahuinya tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat.
3. Belum diketahuinya Hubungan antara faktor-faktor dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kelas BPP di Kabupaten Langkat.
2. Mengetahui tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat.

D. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk melatih diri dalam penelitian serta sumbangan pikiran dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelas BPP di Kabupaten Langkat.
2. Sebagai wadah dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan pengamanaan tentang bagaimana melakukan suatu pengkajian tentang kelas BPP.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan landasan dalam mengambil serta menentukan kebijakan dalam penerapan penerapan kelas BPP.
4. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dalam penyusunan penelitian-penelitian sejenisnya.